

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Dalam BAB I dikemukakan bahwa salah satu kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi penting, karena peneliti melihat masih rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh SKPD, yang dilihat dari penilaian yang masih rendah terhadap kinerja masing – masing SKPD. Selain itu, peneliti juga menganalisis pengaruh tingkat kewirausahaan publik dalam mewujudkan kinerja SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Dengan demikian, pembahasan yang telah diuraikan pada BAB VI dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Pertanyaan **pertama** dalam penelitian berfokus pada pemahaman konsep kewirausahaan publik oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan seberapa jauh konsep tersebut dilaksanakan secara nyata dalam pekerjaan mereka sehari – hari. Berdasarkan hasil analisis pada BAB VI, disimpulkan bahwa pemahaman SKPD Kabupaten Bandung Barat mengenai konsep kewirausahaan publik masih **rendah**. Hal tersebut, dapat dilihat dari persentase

responden sebesar 62,5% bahwa mereka **tidak melakukan perubahan diluar SOP** yang telah ditentukan. Hal tersebut diperkuat dengan persentasi responden sebesar 63,75% bahwa mereka **tidak melaksanakan aktivitas / kegiatan atau prosedur baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi**. Sedangkan untuk penerapan konsep kewirausahaan publik dalam pelaksanaan pekerjaan mereka sehari – hari juga masih **rendah**. Dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dari SKPD Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

- a. untuk ukuran nilai ekonomi hasil pengukurannya adalah *ekonomis*
- b. untuk ukuran nilai efisiensi hasil pengukurannya adalah *tidak efisien*
- c. dan, untuk nilai ukur efektivitas hasil pengukurannya adalah *kurang efektif*.

Dengan demiiikian, dapat disimpulkan bahwa SKPD Kabupaten Bandung Barat belum mengadaptasi konsep kewirausahaan publik dalam menjalankan tugas sehari – hari.

Pertanyaan **kedua** dalam penelitian ini berfokus pada hubungan kewirausahaan publik tersebut dalam mewujudkan kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil analisis pada BAB VI disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman SKPD terhadap karakteristik kewirausahaan publik memiliki hubungan terhadap kinerja dari SKPD. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerapan nilai – nilai kewirausahaan publik yaitu kemampuan dalam mengambil resiko dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang memiliki hubungan terhadap penilaian kinerja yaitu nilai ekonomi.
- b. Penerapan nilai – nilai kewirausahaan publik yaitu kemampuan dalam mengambil resiko dan menciptakan inovasi dengan pengukuran kinerja yaitu nilai efisiensi.
- c. Penerapan nilai – nilai kewirausahaan publik yaitu kemampuan dalam mengambil resiko dan *mission driven* atau memiliki tujuan utama dan
- d. gan pengukuran kinerja yaitu nilai efektivitas.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti untuk peran kewirausahaan publik dalam mewujudkan kinerja di SKPD Kabupaen Bandung Barat yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman konsep kewirausahaan publik di SKPD Kabupaten Bandung Barat, karena dengan menerapkan nilai – nilai kewirausahaan publik akan dapat membantu aparat pemerintah dalam meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
2. Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 386, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi

dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan Demikian, SKPD di Kabupaten Bandung Barat harus lebih berani dalam melakukan setiap perubahan atau pembaharuan dalam penyelenggaraan kinerja dengan berdasar pada peraturan tersebut.

3. Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh SKPD terkait dengan keterbatasan sumberdaya, maka pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyediakan sumberdaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan rekrutmen pegawai secara lebih profesional, mewajibkan setiap pegawai untuk melakukan pelatihan berkala agar kemampuan pegawai dapat terus terasah dan melakukan diskusi wajib dengan tim agar dapat tercipta persepsi yang sama dalam satu tim.
4. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang mana format penulisan telah diatur dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Perlu adanya perhatian pada pengelolaan anggaran setiap program atau kegiatan untuk digunakan semaksimal mungkin sehingga anggaran yang telah tersedia atau direncanakan untuk kebutuhan pelaksanaan program atau kegiatan bisa direalisasikan sepenuhnya atau mencapai 100%.

6. Perlu adanya pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan program atau kegiatan sehingga kinerja keuangan dengan kinerja non keuangan bisa berkorelasi.
7. Perlu perhatian pada tim untuk lebih bekerjasama secara efektif dalam proses pelayanan penyelenggaraan program atau kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terkelola.

Demikian, penjelasan terkait dengan simpulan dan saran dalam BAB VII ini. Besar harapan peneliti, agar penelitian ini dapat menjadi masukan yang baik bagi pihak terkait, yaitu SKPD Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penerapan kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) dalam mewujudkan kinerja organisasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto. 2002.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Bernier, L., dan T. Hafsi.2007. *The Changing Nature of Public Entrepreneurship*.Public Administration Review
- Currie, G., M. Humphreys, D. Ucbasaran, dan S. McManus. 2008.*Entrepreneurial Leadership in The English Public Sector: Paradox or Possibility?*.Public Administration
- Dharminto. 2013.*Metode dan Penelitian Sampel*, Jurnal Universitas Diponegoro. Semarang
- G ,Peter. Klein, Joseph T. Mahoney, Anita M. McGahan, dan Christos N. Pitelis.2010. *Toward a Theory of Public Entrepreneurship*.Toronto: EURAM Macmillan Publishers
- Gay, Lorraine Rumbel dan P.L. Diehl. 1992.*Research Methods for Business and Management*. New York: Mac Millan Publishing Company
- Glod,Grzegorz.2015.*Measurement of Public Entrepreneurship In The Polish Health Sector*. Technology, Innovation and Industrial Management.Poland: University of Economics Katowice
- Harbani, Pasolong.2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Hasan,Iqbal.2006.*Analisis Data Penelitian dengan Statistik*.Jakarta: Bumi Aksara
- Kearney, C., Hisrich, R. D., & Roche, F..2007.*Facilitating Public Sector Corporate Entrepreneurship Process: A Conceptual Model*.Journal of Enterprising Culture
- Lijan, Sinambela Poltak, dkk..2006. *Reformasi Pelayanan publik*.Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- M,Arlennora.2013. *Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Dan Kinerja Organisasi*.Pekanbaru: FISIP Universitas Riau
- Mahmudi.2015.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Mahsun, Mohamad.2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta: BPFE
- _____.2009.*Formalitas Laporan Kinerja Pejabat Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo,. 2004.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Masyhudi.2005. *Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmuilmu Agama*, Vol. VI, No.1
- Morris, M. H. dan Jones, F. F.1999. *Entrepreneurship in Established Organizations: The Case of The Public Sector. Entrepreneurship Theory and Practice*. Florida: Hartcourt Collage Publisher
- Morris, M. H., D. F. Kuratko, dan J.G. Covin. 2008.*Corporate Entrepreneurship and Innovation: Entrepreneurial Development Wiyhin Organizations (2nd ed)*.Thomson/ South – Western: Mason, OH
- Nasucha, Chaizi.2004.*Reformasi Administrasi Publik*.Jakarta: PT. Grasindo
- Niode, Idris Yanto.2012. *Implementasi Entrepreneurial Government Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Suatu Tujuan dan Pengalaman Empiris)*.Gorontalo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
- Ostrom, Elinor.2005. *Unlocking Public Entrepreneurship and Public Economies*.Helsinki: EGDI
- Duwi Priyatno.2012.*Cara Kilat Belajar Analisis Data SPSS 20*.Yogyakarta: ANDI
- Rachmawati, Tutik.2016.*Kewirausahaan Publik Dan Revolusi Mental: Menuju Administrasi Publik yang Lebih Baik*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Kuncoro, Riduwan.2001.*Metode & Teknik Menyusun Tesis*.Bandung: Alfabeta
- _____.2011.*Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*.Bandung: Alfabeta, 2011
- Roberts, N. C..1992.*Public Entrepreneurship and Innovation*.New York: Policy studies review
- Schneider, Mark, Paul Teske, dan Michael Mintrom.1995. *Public Entrepreneurs: Agents for Change in American Government*.Princeton, NJ: Princeton University Press

- Shane, Scott. 2003. *A General Theory of Entrepreneurship: The Individual–Opportunity Nexus*. Cheltenham: Edward Elgar
- Shockley, G. E., Stough, R. R., Haynes, K. E., & Frank, P. M..2006.*Toward A Theory Of Public Sector Entrepreneurship*. Massachusetts: International Journal off Entreneurship and Innovation Management
- Silalahi, Ulber.2005. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung:Unpar Press
- _____. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.1995.*Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Sofyan, Agus. *Kinerja Pelayanan Kependudukan Pada Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bandung Barat*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- _____.2016.*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Wicaksono.2014. *Telaah Kritis Administrasi dan Management Sektor Publik di Indonesia*,. Yogyakarta: Gava Media

B. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

C. DOKUMEN PERANGKAT DAERAH

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 – 2018

D. WEBSITE

<https://m.facebook.com/notes/wahana-jaringan-informasi-terpadu-wajit/permasalahan-issue-strategis-pembangunan-di-kabupaten-bandung-barat/470851019593156/> Diakses pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 20:05 WIB

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/02/17/361344/nilai-c-untuk-kinerja-pemkab-bandung-barat> Diakses pada tanggal 9 Maret 2016 pukul 15:45 WIB

<http://www.bkd.jogjaprovo.go.id/detail/reinventing-government-mewirauahakan-birokrasi-how-the-entrepreneurial-spirit-is-transforming-the-public-sector/294> Diakses pada tanggal 27 April 2016 pukul 20:12 WIB

<http://www3.imperial.ac.uk/secretariat/policiesandpublications/valueformoney> Diakses pada tanggal 16 September 2016 pukul 14:35 WIB

<http://www.bandungbaratkab.go.id/content/disdikpora-selenggarakan-berbagai-kegiatan-minatbakat-dan-prestasi-jenjang-smp> Diakses pada tanggal 4 November 2016 pukul 14:42 WIB

<http://bandung.pojoksatu.id/read/2015/11/30/ini-alasan-pemkab-bandung-barat-raih-penghargaan-kabupaten-tersehat/> Diakses pada tanggal 4 November 2016 pukul 14:30 WIB

<http://www.bandungbaratkab.go.id/content/uji-emisi-dishubkominfo> diakses pada 4 November 2016 pukul 15:01 WIB

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Disdukcapil+Kabupaten+Bandung+Barat+Siapkan+Darling&dn=20150114090335> Diakses pada tanggal 4 November 2016 pukul 15:44 WIB

<http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2015/11/17/kualitas-kopi-kabupaten-bandung-barat-telah-bersaing-di-mancanegara/> Diakses pada 5 November 2016 pukul 18:05 WIB